

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika toleransi di desa multireligi Kediri menunjukkan bahwa harmoni yang tampak stabil di permukaan sesungguhnya disangga oleh proses sosial yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kerukunan yang diwariskan. Dinamika toleransi bukanlah harmoni murni atau sekadar hasil dari nilai-nilai sopan santun, tetapi merupakan arena dialektis yang mempertahankan keseimbangan melalui proses adaptasi, represi halus, dan normalisasi perbedaan dalam batas-batas tertentu. Toleransi beragama di Kabupaten Kediri bukanlah keadaan sosial yang statis ataupun harmonis tanpa gesekan. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari sejarah koeksistensi panjang antara pemeluk Islam, Kristen, Hindu, dan kepercayaan lokal yang kemudian terinternalisasi menjadi pola disposisi sosial. Masyarakat tidak memaknai toleransi sebagai doktrin moral, melainkan sebagai praktik hidup yang mengakar melalui pengalaman bertetangga, kerja bakti, ritual desa, dan hubungan kekerabatan.

Kontestasi dan konsolidasi bukan dua fenomena yang terpisah, melainkan dua mekanisme yang saling mengkonstruksi habitus toleransi. Kontestasi muncul sebagai bagian alami dari kehidupan multireligi, perebutan ruang simbolik hingga perbedaan kepentingan antar kelompok. Namun kontestasi ini tidak hanya berwujud konflik terbuka, tetapi juga hadir dalam bentuk-bentuk halus seperti persaingan pengaruh tokoh, manajemen akses terhadap tradisi, dan siapa yang berhak menentukan makna atas peristiwa sosial tertentu. Sementara konsolidasi hadir sebagai mekanisme yang menstabilkan kontestasi tersebut. Konsolidasi dilakukan melalui ritual bersama, pembagian giliran, gotong-royong, dan intervensi tokoh-tokoh bermodal simbolik. Namun secara kritis, konsolidasi tidak berada di ruang yang sepenuhnya netral. Dengan demikian, kontestasi dan konsolidasi bukan hanya proses sosial, aspek emosional dan strukturalnya saling terkait. Kontestasi memberi tekanan pada struktur, konsolidasi memperkuat kembali struktur itu, dan habitus terbentuk dari siklus panjang interaksi antara kedua kekuatan tersebut. Habitus toleransi

bukan sekadar hasil internalisasi nilai kebersamaan, tetapi juga produk dari negosiasi halus antara kepentingan, kekuasaan, dan stabilitas.

Praktik kontestasi dan konsolidasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi beragama tidak bekerja hanya pada tingkat kesadaran moral, tetapi terutama pada mobilisasi modal sosial, simbolik, dan kultural yang dimiliki masyarakat. Modal sosial berupa jejaring lintas agama menyediakan infrastruktur sosial yang memungkinkan warga bekerja bersama di tengah perbedaan. Modal simbolik yang dimiliki tokoh agama dan pemimpin desa memberikan otoritas moral untuk meredam ketegangan. Sementara modal kultural berupa tradisi, ritus komunal, dan narasi lokal menyediakan sistem makna yang memperkuat keterikatan antar kelompok. Pemanfaatan modal-modal ini tampak jelas ketika masyarakat menghadapi isu sensitif, terutama yang dipicu dari luar desa. Ketika ada provokasi atau tekanan, modal sosial berfungsi sebagai pelindung, warga saling mengingatkan bahwa hubungan mereka lebih kuat daripada isu yang datang dari luar. Modal simbolik tokoh lokal bekerja sebagai mediator yang diterima oleh semua pihak. Modal kultural membantu warga menegosiasikan kembali batas-batas perbedaan tanpa harus merusak struktur sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa toleransi beragama pada masyarakat multireligi di Kabupaten Kediri adalah konstruksi sosial yang kompleks dan dinamis. Ia dibangun melalui interaksi panjang antara habitus, modal, dan struktur arena, bukan hanya melalui nilai moral abstrak. Harmoni yang terlihat stabil sebenarnya bergantung pada keseimbangan antara kontestasi yang terus muncul dan konsolidasi yang terus dikerjakan. Toleransi tetap terjaga karena masyarakat mampu memobilisasi modal-modal sosial dan simbolik secara efektif, serta karena habitus yang terbentuk mendorong mereka untuk memilih harmoni daripada konflik.

B. Saran

Penelitian ini memperlihatkan bahwa toleransi bukan hanya entitas normatif, tetapi praktik sosial yang diproduksi melalui mekanisme historis, interaksi simbolik, jaringan sosial, dan arena kekuasaan. Penelitian ini telah

menghasilkan model konseptual yang menempatkan habitus sebagai titik temu antara konstruksi sosial (Berger), modal sosial (Putnam), dan arena - praktik (Bourdieu). Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini pada konteks lain yang memiliki karakter berbeda, misalnya desa homogen, kawasan urban, atau wilayah dengan rekam konflik.

Dalam wilayah praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi bertahan karena adanya aktor kunci, institusi aktif, dan arena interaksi yang terjaga. Untuk memastikan keberlanjutan proses tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan yaitu memperkuat pendidikan nilai berbasis konteks lokal seperti pada SDN 2 Besowo telah menjadi ruang internalisasi nilai toleransi yang efektif, serta mendorong regenerasi panitia lintas agama secara terencana, serta memfasilitasi ruang dialog rutin antar agama. Mengembangkan dokumentasi digital toleransi desa karena dokumentasi ini berguna untuk pembelajaran lintas generasi serta representasi identitas desa ke dunia luar.

C. Rekomendasi

Dalam ranah kebijakan, penting bagi pemerintah daerah maupun lembaga pusat untuk melihat praktik toleransi di Besowo dan Kalipang sebagai model yang lahir dari dinamika lokal. Praktik toleransi diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui indikator yang mengukur kohesi sosial, intensitas interaksi lintas agama, keberlanjutan tradisi lokal, dan kontribusi tokoh adat serta tokoh agama dalam menjaga harmoni. Tradisi seperti selamatan desa, gotong royong rumah ibadah, atau rotasi panitia lintas agama perlu dilihat sebagai aset budaya yang layak mendapatkan dukungan kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat merancang skema desa inklusif multireligi yang memberikan ruang pembiayaan, pelatihan, dan advokasi bagi desa-desa dengan karakter keberagaman serupa.

Pada tingkat pemerintah desa dan perangkat kecamatan, rekomendasi diarahkan pada penguatan struktur yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni. Pemerintah desa dapat memperkuat mekanisme rotasi panitia lintas agama dengan sistem kaderisasi yang melibatkan pemuda dan perempuan, sehingga keberlanjutan kegiatan lintas agama tidak hanya bergantung pada

tokoh tertentu. Ruang publik seperti balai desa, pendopo, dan lapangan dapat dioptimalkan menjadi arena perjumpaan sosial melalui kegiatan olahraga, seni, dialog kewargaan, serta forum sosial yang mempertemukan warga antar agama secara rutin. Selain itu, tantangan baru berupa arus informasi digital menuntut pemerintah desa untuk menyediakan program literasi digital, sehingga warga yang khususnya generasi muda memiliki kemampuan untuk mengenali narasi intoleran, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak harmoni yang telah lama dijaga.

Komunitas lokal, sekolah, pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki peran sentral sebagai pengampu nilai dan pemelihara praktik toleransi. Sekolah, seperti SDN 2 Besowo dapat terus mengembangkan pendidikan nilai berbasis pengalaman, mengintegrasikan sejarah desa, tradisi lokal, dan praktik lintas agama ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Generasi muda perlu didampingi agar dapat terlibat dalam struktur kepemimpinan desa, panitia acara, kegiatan karang taruna, atau forum warga. Tokoh agama dan tokoh adat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam membangun ruang dialog yang lebih cair dan informal, sehingga warga memiliki ruang untuk saling berbagi pengalaman, keluhan, dan aspirasi tanpa hambatan struktural. Yang tidak kalah penting, solidaritas keseharian, seperti saling membantu dalam hajatan, kerja bakti, atau dukungan ketika ada musibah tetap menjadi pilar paling kuat bagi keberlangsungan toleransi. Nilai-nilai tersebut harus dijaga sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat.